

## Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Studi Kasus Di Desa Sungai Geringging Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar

\* Firdaus<sup>1</sup>, Panca Setyo Prihatin<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

<sup>2</sup>Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

\*Corresponding Author : [firdaus@student.uir.ac.id](mailto:firdaus@student.uir.ac.id)

### Abstrak

Penelitian yang dilakukan pada saat penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan keuangan desa melalui penggunaan aplikasi Siskeudes di Desa Sungai Geringging, Kecamatan Kampar Kiri. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan teknik wawancara serta observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Siskeudes telah digunakan sejak 2023, implementasinya masih terkendala oleh keterbatasan SDM, minimnya infrastruktur, rendahnya literasi digital, lemahnya pengawasan, serta ketidaktegasan struktur organisasi. Hambatan tersebut menyebabkan keterlambatan pelaporan dan belum optimalnya transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

**Kata Kunci:** Implementasi, Siskeudes, Transparansi, Akuntabilitas, Keuangan Desa

### Abstract

*This study aims to examine the implementation of village financial management policy through the use of the Siskeudes application in Sungai Geringging Village, Kampar Kiri District. The research employed a qualitative method with a descriptive approach, using interview and observation techniques. The findings indicate that although Siskeudes has been used since 2023, its implementation is still constrained by limited human resources, inadequate infrastructure, low digital literacy, weak supervision, and the absence of a firm organizational structure. These obstacles have led to delays in financial reporting and have hindered the achievement of optimal transparency and accountability in village financial management.*

**Keywords:** Implementation, Siskeudes, Transparency, Accountability, Village Finance

## PENDAHULUAN

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa merupakan pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, terlebih setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah melalui BPKP dan Kementerian Dalam Negeri memperkenalkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sebagai instrumen digital untuk merencanakan, menatausahakan, dan melaporkan keuangan desa secara terstandar dan elektronik. Regulasi seperti Permendagri No. 20 Tahun 2018 dan SE Mendagri No. 143/2022 bahkan mewajibkan penggunaan aplikasi ini di seluruh desa di Indonesia. Namun dalam praktiknya, implementasi kebijakan ini tidak selalu berjalan secara optimal.

Di Desa Sungai Geringging, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, sistem pengelolaan keuangan desa sudah menggunakan aplikasi Siskeudes sejak tahun 2023. Namun, implementasinya masih belum optimal. Proses pelaporan sering mengalami keterlambatan, dan penggunaan aplikasi masih terbatas pada input dasar. Sebagian perangkat desa masih mengalami kendala dalam pengoperasian teknis, sementara dukungan infrastruktur seperti komputer dan jaringan internet belum memadai. Hal ini menyebabkan proses pengelolaan keuangan belum sepenuhnya terdokumentasi secara digital, serta pengawasan belum berjalan efektif. Permasalahan yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih, rendahnya literasi digital, minimnya infrastruktur, lemahnya pembinaan dari pemerintah daerah, dan belum tegaknya struktur kelembagaan secara internal. Kendala-kendala tersebut menimbulkan risiko menurunnya kualitas akuntabilitas dan keterbukaan informasi, serta menghambat ketepatan waktu dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban.

Dalam studi kepustakaan, Edward III (2025) menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh empat dimensi: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Sementara itu, Grindle (1980) menekankan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh substansi kebijakan, konteks pelaksanaan, dan hasil kebijakan. Sejumlah penelitian sebelumnya telah menelaah efektivitas penggunaan Siskeudes dalam meningkatkan akuntabilitas (Saputra et al., 2025; Dedi Saputra, 2022), namun kebanyakan fokus pada desa-desa yang telah mengimplementasikannya secara menyeluruh. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan fokus pada desa yang baru menerapkan sistem, namun masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan teknis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi secara mendalam faktor-faktor yang menghambat efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan keuangan desa dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas di Desa Sungai Geringging. Penelitian ini ditujukan bagi akademisi, aparatur desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta pemangku kepentingan kebijakan lainnya. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan interpretatif, yang bertujuan menangkap makna dan pengalaman para pelaksana kebijakan secara langsung melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada konteksnya: berfokus pada desa yang telah menggunakan aplikasi digital pengelolaan keuangan, namun implementasinya belum berjalan secara menyeluruh dan optimal. Penelitian ini tidak hanya membahas aspek teknis, tetapi juga menyelidiki dimensi kebijakan, kelembagaan, dan sosial yang memengaruhi keberhasilan implementasi Siskeudes di tingkat desa.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan paradigma interpretatif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam proses implementasi kebijakan pengelolaan keuangan desa di Desa Sungai Geringging, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar. Pendekatan ini dipilih karena dapat menangkap realitas sosial, persepsi, serta kendala faktual dari pelaksana kebijakan di tingkat desa.

Strategi pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap tujuh informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu: Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Ketua BPD, staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta dua tokoh masyarakat. Informan dipilih berdasarkan keterlibatannya dalam pengelolaan keuangan desa atau pengawasannya.

Karakteristik informan berasal dari latar belakang birokrasi desa dan masyarakat lokal, dengan tingkat literasi digital yang beragam. Budaya masyarakat cenderung kolektif dan sentralistik, di mana keputusan kepala desa memiliki pengaruh dominan terhadap tata kelola. Hal ini menjadi konteks penting yang memengaruhi proses implementasi kebijakan, termasuk dalam penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

Data dikumpulkan selama periode April hingga Juli 2025 di Desa Sungai Geringging. Bentuk data yang dihimpun meliputi transkrip hasil wawancara, catatan lapangan dari observasi, serta dokumen-dokumen administratif seperti APBDes, laporan pertanggungjawaban, dan surat edaran resmi dari pemerintah daerah.

Analisis data dilakukan secara tematik dengan tahapan: (1) reduksi data untuk menyaring informasi penting, (2) kategorisasi temuan berdasarkan dimensi implementasi kebijakan menurut teori Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi, (3) triangulasi antar sumber data untuk memastikan validitas, dan (4) interpretasi mendalam terhadap tema-tema yang muncul untuk menjawab fokus penelitian. Pendekatan ini dipilih agar analisis dapat menjelaskan secara menyeluruh faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan keuangan desa secara kontekstual.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan desa dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas di Desa Sungai Geringging, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar. Evaluasi dilakukan berdasarkan tiga indikator utama yang dikembangkan oleh Grindle (1980), yaitu: substansi kebijakan (*content of policy*), konteks pelaksanaan (*context of implementation*), dan hasil kebijakan (*outcome*).

### 1. Substansi Kebijakan (*Content of Policy*)

Substansi kebijakan pengelolaan keuangan desa sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 dan Surat Edaran Mendagri No. 143/2022 mewajibkan desa untuk menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam seluruh proses keuangan. Namun, di Desa Sungai Geringging kebijakan ini belum diimplementasikan secara optimal. Desa masih menggunakan sistem manual berbasis Microsoft Excel dan Word dalam pencatatan dan pelaporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa substansi kebijakan belum terinternalisasi secara menyeluruh pada tingkat pelaksana. Padahal, aplikasi tersebut bertujuan sebagai standar akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa.

**Tabel.1.**  
**Substansi Kebijakan di Desa Sungai Geringging**

Komponen	Realitas di Lapangan	Status
Penggunaan Siskeudes	Sudah digunakan dalam pengelolaan rutin tetapi mengalami keterlambatan pengimputan	Tidak Optimal
Format pelaporan	Sudah Menggunakan Siskundes	Sudah Sesuai
Pemahaman regulasi	Rendah	Perlu pelatihan
Pembaruan struktur kebijakan	Belum ada sejak Kades baru	Tidak optimal

Sumber : Olahan Data Lapangan,2025

Data dalam Tabel 1 menunjukkan bahwa substansi kebijakan pada dasarnya telah dikenal oleh perangkat desa melalui penggunaan aplikasi Siskeudes. Namun, pelaksananya belum berjalan maksimal. Terlihat dari keterlambatan pengimputan data dan masih rendahnya pemahaman terhadap regulasi teknis. Format pelaporan memang sudah menggunakan Siskeudes, tetapi hanya sebatas formalitas input tanpa optimalisasi fungsi. Selain itu, tidak adanya pembaruan struktur kebijakan internal desa sejak pergantian kepala desa menunjukkan lemahnya adaptasi terhadap kebijakan baru. Hal ini mengindikasikan bahwa substansi kebijakan belum sepenuhnya diinternalisasi sebagai pedoman kerja yang konkret.

## 2. Konteks Pelaksanaan (*Context of Implementation*)

Pelaksanaan kebijakan di lapangan dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung, seperti sumber daya manusia, infrastruktur, serta pembinaan teknis. Data menunjukkan bahwa hanya satu dari lima perangkat utama yang pernah mengikuti pelatihan penggunaan aplikasi Siskeudes, sedangkan lainnya belum memiliki kompetensi teknis yang memadai. Selain itu, komputer yang tersedia hanya satu unit dan berspesifikasi rendah, sementara jaringan internet sangat terbatas. Keterbatasan ini menghambat proses pelaporan, penyusunan APBDes, hingga pertanggungjawaban keuangan. Supervisi dari kecamatan dan Dinas PMD pun masih bersifat administratif dan tidak dilakukan secara rutin.

**Tabel 2.**  
**Kendala Kontekstual Pelaksanaan Kebijakan**

Aspek Konteks	Kondisi Nyata	Dampak Utama
SDM terlatih	2 orang dari 15 perangkat	Ketergantungan tinggi
Komputer	2 unit, spesifikasi rendah	Aplikasi tidak berjalan
Internet	Lemah	Tidak bisa sinkronisasi
Supervisi eksternal	Minim, tidak regular	Tidak ada bimbingan teknis

Sumber: Olahan Data Lapangan, 2025

Tabel 2 memperlihatkan bahwa konteks pelaksanaan belum memadai untuk menunjang kebijakan yang telah ditetapkan. Jumlah perangkat desa yang terlatih masih sangat minim, sehingga operasionalisasi aplikasi tergantung pada individu tertentu. Sarana pendukung seperti komputer jumlahnya terbatas dan tidak memadai secara

teknis. Jaringan internet yang lemah membuat proses sinkronisasi data ke pusat menjadi terhambat. Lebih lanjut, pembinaan dari instansi eksternal seperti Dinas PMD belum berjalan rutin, sehingga pelaksana di lapangan tidak mendapatkan bimbingan atau evaluasi berkala. Keseluruhan kondisi ini menunjukkan bahwa lingkungan pelaksanaan kebijakan belum mendukung penerapan kebijakan secara efektif.

### 3. Hasil Kebijakan (Outcome)

Pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan desa di Desa Sungai Geringging telah menunjukkan perkembangan positif, salah satunya dengan mulai digunakannya aplikasi Siskeudes dalam proses administrasi keuangan. Penggunaan aplikasi ini merupakan langkah awal menuju tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel. Namun, implementasinya masih belum berjalan secara optimal. Proses pelaporan keuangan masih mengalami keterlambatan akibat keterbatasan sumber daya manusia yang memahami teknis penggunaan aplikasi, serta kendala sarana seperti komputer berspesifikasi rendah dan jaringan internet yang tidak stabil. Meskipun aplikasi sudah digunakan, pencatatan dan dokumentasi beberapa pengeluaran masih belum sepenuhnya terdigitalisasi secara sistematis.

Dari sisi keterbukaan informasi, pemerintah desa telah melakukan upaya transparansi dengan menampilkan informasi APBDes melalui baliho yang dipasang di depan kantor desa. Namun, informasi yang ditampilkan masih terbatas pada rincian umum dan belum diperbarui secara berkala. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan belum sepenuhnya berjalan efektif dan masih bersifat formalitas, seperti hanya hadir dalam musyawarah desa tanpa keterlibatan dalam evaluasi dan kontrol keuangan secara aktif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun penggunaan aplikasi dan upaya publikasi informasi sudah dilakukan, hasil kebijakan belum sepenuhnya mencapai tujuan ideal dari kebijakan pengelolaan keuangan desa, yaitu mewujudkan sistem yang transparan, akuntabel, dan partisipatif secara berkelanjutan.

### SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan desa dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas di Desa Sungai Geringging. Berdasarkan tiga indikator teori Grindle (1980)—substansi kebijakan, konteks pelaksanaan, dan hasil kebijakan—dapat disimpulkan bahwa implementasi belum berjalan secara optimal. Secara substansi, kebijakan penggunaan aplikasi Siskeudes telah dikenal dan mulai dijalankan oleh perangkat desa, namun belum sepenuhnya terinternalisasi dalam mekanisme kerja harian. Dari sisi konteks pelaksanaan, hambatan berupa keterbatasan SDM, sarana prasarana yang tidak memadai, serta lemahnya pendampingan teknis dari pihak eksternal masih menjadi kendala utama. Sementara itu, dari sisi hasil kebijakan, penggunaan aplikasi dan publikasi informasi melalui baliho telah menunjukkan upaya menuju transparansi, namun masih bersifat terbatas dan belum sepenuhnya partisipatif atau akuntabel.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Mustanir, S.I.P., M.Si., A. P. (2023). PENGANTAR ILMU PEMERINTAHAN. widina media utama.
- Arwani, A., & Priyadi, U. (2024). Eksplorasi Peran Teknologi Blockchain dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Keuangan Islam: Tinjauan

- Sistematis. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, 2(2), 23–37.  
<https://doi.org/10.59024/jise.v2i2.653>
- Dr. Tiomy Butsianto Adi, S.E., M.Si, Muh. Irfandy Azis, S.E., M.Acc., P. . (2025). Standar Akuntansi Pemerintahan : Panduan Lengkap untuk Transparansi Keuangan publik. takaza innovatik labs.
- Dwiatmoko, A., Nursadi, H., Hukum, F., & Indonesia, U. (2022). Problematika dan Penataan Pembentukan Peraturan Daerah Melalui Harmonisasi yang Sentralistik. 292–306.
- Eko, S. (2021). Government Making: Rebuilding Government Science. *GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)*, 2(1), 1–20.  
<https://doi.org/10.47431/governabilitas.v2i1.109>
- Ermi Rosmita, Prisca Diantra Sampe, Tito Pangesti Adji, Naela Khusna Faela Shufa, Nasir Haya, Isnaini Isnaini, Frankie Jantje Hendrikus Taroreh, Veronica Yonita Wongkar, Ignatia Rosali Honandar, Ronaldo Ferdy Ignatius Rottie, M. S. (2024). Metode Penelitian Kualitatif. CV GITA LENTARA.
- Fatimah, S. A. (2021). Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(11), 1–15.
- Gorontalo, U. N., Jend, J., No, S., & Gorontalo, K. (2025). *Jambura Accounting Review Evaluasi Perencanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa*. 6(1), 237–248.
- Idris, M. (2025). INDIKATOR TRANSPARANSI KAMPANYE DONASI. 9(2), 3129–3136.
- Irawan, S., Handayani, R., Publik, A., Sultan, U., & Tirtayasa, A. (2025). Analisis Implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia ( SDI ) di Pemerintah Provinsi Banten. 8(1), 1–16.
- Irawanto, Dody Saputra, M. Jamili, Ali Khamdan, Mukhlan Khariry, A. A. (2025). IMPLEMENTATION OF THE REGULATION OF THE REGENT OF TANAH LAUT NUMBER 12 OF 2019 CONCERNING VILLAGE FINANCIAL MANAGEMENT AT THE COMMUNITY AND VILLAGE EMPOWERMENT OFFICE OF TANAH LAUT DISTRICT. 9(12), 40–50. <https://doi.org/10.35722/jurnalpubbis.v9i1.1239>
- John W. Creswell, J. D. C. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*.
- Lubis, Eliza Handayani Sarah, Karin Siahaan, Angelina Bakara, S. (2024). PENGELOLAAN KEUANGAN PADA KANTOR CAMAT MEDAN TEMBUNG Kecamatan Medan Tembung 2019-2022. 1(2), 53–66.
- Manshurin, F. R., Zydhan, M., & Saputra, C. (2024). Penyalahgunaan Dana Desa Dihubungkan Dengan Akuntabilitas Dalam Pemerintahan Desa Studi Kasus Desa Gampong Piyegung Lhang. 3(2), 98–108.
- Miftah Farid, Tatang Ibrahim, Hasbiyallah, O. A. (2025). Mekanisme pengambilan keputusan berbasis sistem informasi manajemen dalam lembaga pendidikan islam. 6(1), 86–103.
- Muhtar Haboddin. (2015). pengantar ilmu pemerintahan. elektronik pertama dan terbesar diindonesia.
- Oleh Said Hamzali, S.IP., MM , Weni Indah Doktri Agus Tapaningsih,S.P,M.M, Dr. Rika Endah Nurhidayah, S.Kp. M.Pd, Abu Hasan Asy'ari, S.Kom, SE, MM, Muhammad, S.Pd,I.M.Pd, NUNUNG NURHAYATI, S.E., M.M., Abdul Rosid, S.E., M.M., Inta

- Hartaningtyas Rani, MBA., M. P. (2022). PENGANTAR MANAJEMEN Teori Dan Aplikasi. CV Azka Pustaka.
- Permana, D., Studi, P., Ilmu, M., Fisip, P., Majalengka, K., & Kertajati, P. B. (2025). Analisis Dampak Implementasi Pembangunan Bandara Kertajati Terhadap Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat.
- Sahid, A., Masse, A., Publik, A., & Makassar, S. Y. (2025). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Jalanan di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Gowa. 1.
- Saputra, D. Y., Nurdin, I., Bungaran, J., & Sinaga, B. (2025). Studi terhadap pemikiran prof. dr. sadu wasistiono, m.s. mengenai ilmu pemerintahan di indonesia. 11(1), 98–109.
- Sasmito, C., Purwatningsih, A., Publik, A., Tribhuwana, U., Malang, T., Tribhuwana, U., & Malang, T. (2021). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN. 2515(1).
- Siti Avivah Haona Piroso, I. N. (2025). ANALISIS PENERAPAN AKUNTABILITAS DAN KEAKURATAN LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA BERDASARKAN SAK EMKM (STUDI KASUS LEMBAGA TERAPI ANAK INSAN MANDIRI KOTA SUKABUMI). 9, 65–72.
- Sukardi, S., Halim, H., & Anwar, D. R. (2024). Akuntabilitas Dan Ekuitas Syariah Terhadap Konsep Biaya Hutang Dalam Bisnis Syariah. YUME: Journal of Management, 7(1), 729–736.
- Sukolilo, K., Surabaya, K., & Jawa, P. (2024). Implementasi Kebijakan Sekolah Orang Tua Hebat ( SOTH ) Guna Mendukung Percepatan Penurunan Stunting Gambar 1 . Persentase Balita Stunting Surabaya. 2(3).
- Tim Visi Yustisia. (2015). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Terkait. visimedia.
- Zees, S. W. (2025). Peran Hukum Administrasi Negara dalam Menjamin Kepentingan Umum : Studi Kasus Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik di Indonesia. 5(1), 403–416.